

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Tipe Penelitian	11

1.5.2 Pendekatan Masalah.....	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	16
BAB II STATUS KEWARGANEGARAAN STATELESS PERSON YANG	
MENIKAH DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA	
2.1 Status Kewarganegaraan Sebagai HAM.....	17
2.1.1 Orang Tanpa Status Kewarganegaraan (<i>Stateless Person</i>)	21
2.1.2 Status Kewarganegaraan Bagi Orang Rohingya (<i>Stateless Person</i>).....	24
2.2 Perlindungan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berstatus	
<i>Stateless Person</i>	26
2.2.1 Permohonan Status Kewarganegaraan Bagi Orang Rohingya	30
2.2.2 Status Kewarganegaraan Bagi Stateless Person Yang Menikah di Indonesia.....	34
2.2.3 Peran Negara Dalam Melindungi Status Kewarganegaraan Bagi Seseorang	35
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM NEGARA INDONESIA TERHADAP	
ANAK HASIL PERKAWINAN WNI DENGAN STATELESS	
3.1 Perkawinan Sebagai HAM	37

3.1.1 Itsbat Nikah Antara WNI Dengan Pengungsi Yang Berstatus <i>Stateless</i> <i>Person</i>	39
3.1.2 Perlindungan Bagi Istri Akibat Suami Yang Di Deportasi	42
3.2 Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak	47
3.2.1 Status Kewarganegaraan Anak Hasi Perkawinan WNI Dengan <i>Stateless</i> <i>Person</i>	49
3.2.2 Kewajiban Negara Dalam Melindungi Status Kewarganegaraan Anak	52
3.2.3 Tertib Administrasi Dan Kepastian Hukum Dalam Pencatatan Kelahiran.....	57
3.2.4 Pengaruh Deportasi Bagi Orang Tua <i>Stateless Person</i> Terhadap Anak	59
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.1 Saran	65

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 5216).

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).

Kompilasi Hukum Islam

Konvensi Dan Perjanjian Internasional

Universal Declaration of Human Rights

Convention on the Rights of the Child

The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees

Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959

DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1 Perbandingan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006**